KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Oleh: Samrin Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

Abstrak

Pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat menentukan dalan kemajuan suatu negara, Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, adat, agama, bahasa dan lainlain. Kesatuan ini yang akan menjadi bentuk negara ini secara plural melalui pendidikan, perbedaaan ini dapat disatukan agar tidak terjadi diskriminasi yang menyudutkan pada satu golongan. Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural terbesar di dunia, kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari sosio kultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Keragaman ini diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan seperti yang sekarang dihadapi bangsa ini. Seperti korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkunghan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain adalah bentuk nvata multikulturalisme.

Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses pembelajaran yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleransi, dan sikap terbuka (inklusif). Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak hanya terbatas pada dimensi kognitif belaka. lebih dari itu, juga menuntut perubahan pada dimensi afektif dan psikomotorik.

Kata Kunci : Pendidikan dan Multikultural.

A. Pendahuluan

Keragaman dan perbedaan merupakan desain Tuhan (sunatullah) yang tidak dapat dielakkan dari panggung kehidupan, *conditio sine qou*

non.¹ Pepatah Arab menyebutnya sebagai *min lawāzim al-hayāh* (keniscayaan hidup). Kehadirannya akan senantiasa ada. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Hujurāt / 49 : 13. Sebagai berikut:

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".²

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan secara berbeda-beda dan yang aling mulia hanya dengan ketaqwaannya. Kendati demikian, ternyata nilai-nilai pluralitas dan multikulturalitas kurang cukup diapresiasi oleh kebanyakan orang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya individu yang ingin meniadakan kebhinekaan, menggantinya dengan ketunggalan dan keseragaman. Kekerasan, terorisme, dan peperangan dengan mengatasnamakan agama dan etnisitas adalah beberapa contoh tindakan yang menghendaki keseragaman.

Pendidikan multikultural merupakan gejala baru dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persaman hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang. Penerapan strategi dan konsep pendidikan multikultural yang terpenting dalam strategi ini tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga akan menigkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis dan demokratis.

Melihat fenomena tersebut pendidikan di Indonesia haruslah peka mengahadapi perputaran globalisasi, pengalaman pahit masa lalu tidak perlu terulang kembali, untuk itu perlu pendidikan multikultural sebagai jawaban atas beberapa problematika kemajemukan tersebut. Oleh sebab

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. III; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 517.

121

¹Ahmad Asroni, "Membendung Radikalisme Islam: Upaya Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama", dalam Erlangga Husada, dkk., *Kajian Islam Kontemporer* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 36.

itu, penulis berusaha menjabarkan sedikit wawasan tentang konsep pendidikan multikultural di Indonesia.

B. Hakekat Pendidikan Multikultural

1. Pengertian Pendidikan Multikultural

Sebagai sebuah wacana baru, pengertian pendidikan multikultural sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan masih banyak pakar pendidikan yang memperdebatkannya. Namun demikian, bukan berarti bahwa definisi pendidikan multikultural tidak ada atau tidak jelas. Sebetulnya, sama dengan definisi pendidikan yang penuh penafsiran antara satu pakar dengan pakar lainnya di dalam menguraikan makna pendidikan itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada penafsiran tentang arti pendidikan multikultural.

James Banks dalam Choirul Mahfud, mendefinisikan pendidikan multikutural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan). Kemudian, bagaimana seseorang mampu mensikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.³ Jadi, pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya.

Sonia Nieto mengemukakan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan yang komprehensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Model pendidikan ini menentang segala bentuk rasisme dan bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, jender, dan lain sebagainya) yang terefleksikan di antara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru.⁴

Sementara itu, Bikkhu Parekh mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai sebuah pendididikan yang bebas dari prasangka dan bias entosentris serta bebas untuk mengeksplorasi dan mempelajari

³Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). h. 175.

⁴Sonia Nieto, *Language, Culture, and Teaching* (Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum, 2002), h. 29.

berbagai budaya dan perspektif lain.⁵ Menurut perspektif Azyumardi Azra, pendidikan multikultural merupakan suatu model pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespons perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.⁶

Selanjutnya, Musya Asy'arie mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai proses penanaman cara hidup menghargai, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengahtengah masyarakat plural. Demikian halnya, Tilaar mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu wacana yang lintas batas, karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial (*social justice*), demokarasi dan hak asasi manusia.

Secara singkat Andersen dan Custer dalam H.A Dardi Hasyim & Yudi Hartono mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya. Sedangkan Zakiyuddin Baidhawy menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Berdasarkan uraian tersebut di atas, definisi yang disampaikan Zakiyuddin Baidhawy adalah definisi yang digunakan sesuai dengan kondisi Indonesia.

Hilda Hernandez dalam Choirul Mahfud mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekomomi yang dialami oleh masing-masing

⁵Bikkhu Parekh, *Rethingking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2000), h. 230.

⁶Azyumardi Azra, "Merayakan Kemajemukan, Merawat Indonesia", *Makalah* disampaikan pada Orasi Budaya, Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies (IMPULSE), di Auditorium Kanisius, Yogyakarta, pada 30 Agustus 2007. Lihat pula Mashadi Imron, *Pendidikan Agama Islam Dalam Persepektif Multikulturalisme* (Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009), h. 48.

Musya Asy'arie, "Pendidikan Mulikultural dan Konflik Bangsa", http://www.64.2 03.71. 11/kompas/cetak/0409/03/opini/1246546.htm. (Diakses pada 10 Mei 2014).

⁸H.A.R Tilaar, *Kekusaan Dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural* (Jakarta: IndonesiaTeras, 2003), h.167.

⁹H.A Dardi Hasyim &Yudi Hartono, *Pendidikan Multikultural di Sekolah* (Surakarta: UPT penerbitan dan percetakan UNS, 1994), h. 28.

¹⁰Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: PT Erlangga, 2005), h. 8.

individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Hal ini berarti bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (plural), baik latar belakang maupun basis sosio budaya yang melingkupinya.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Paulo Freire (pakar pendidikan pembebasan), bahwa pendidikan bukan merupakan "menara ganding" yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan, menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. ¹²

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menawarkan satu alternatif melalui implementasi strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang terdapat dalam masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik seperti pluralitas etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, jender, kemampuan, umur, dan ras. Strategi pendidikan ini tidak hanya bertujuan supaya peserta didik mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, namun juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar senantiasa berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis.

Hal terpenting yang perlu digarisbawahi dalam praktek pendidikan multikultural bahwa seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mata pelajaran yang diajarkan, namun seorang guru juga harus mampu menanamkan nilainilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme.

Pendidikan multikultural merupakan model pendidikan yang menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep

¹¹Choirul Mahfud, op. cit., h. 176.

¹²Lihat Paulo Freire, *Pendidikan Pembebasan* (Jakarta: LP3S, 2000), h. 21.

pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras, maka perlu mempertimbangkan beberapa hal, sebagaimana yang dikemukakan Tilaar, sebagai berikut:

Pertama, pendidikan multikultural secara inhern sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. Falsafah bangsa Indonesia adalah bhineka tunggal ika, suka gotong royong, membantu, dan menghargai antar satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam potret kronologis bangsa ini yang sarat dengan masuknya berbagai suku bangsa asing dan terus berakulturasi dengan masyarakat pribumi. Misalnya etnis cina, etnis arab, etnis afrika dan sebagainya. Semua suku itu ternyata secara kultural telah mampu beradaptasi dengan sukusuku asli negara Indonesia. Misalnya suku jawa, batak, bugis, makassar, tolaki, dayak, dan suku lainnya.

Kedua, pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Pendidikan multikultural, adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, heterogenitas, pluralitas dan keragaman, apapun aspeknya dalam masyarakat.

Ketiga, pendidikan multikultural menentang pendidikan yang bererintasi bisnis. Pada saat ini, lembaga pendidikan baik sekolah atau perguruan tinggi berlomba-lomba menjadikan lembaga pendidikannya sebagai sebuah institusi yang mampu menghasilkan *income* yang besar, dengan alasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik. Padahal semua orang tahu, bahwa pendidikan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia bukanlah pendidikan keterampilan belaka, melainkan pendidikan yang harus mengakomodir semua jenis kecerdasan yang sering dikenal dengan nama kecerdasan ganda (multiple intelligence).

Keempat, pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan. Kekerasan muncul ketika saluran kedamaian sudah tidak ada lagi. Kekerasan tersebut sebagai akibat dari akumulasi berbagai persoalan masyarakat yang

¹³Lihat H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 35.

tidak terselesaikan secara tuntas dan saling menerima. Ketuntasan penyelesaian berbagai masalah masyarakat adalah prasyarat bagi munculnya kedamaian. Fanatisme yang sempit juga bisa meyebabkan munculnya kekerasan. Fanatisme ini juga berdimensi etnis, bahasa, suku, agama, atau bahkan sistem pemikiran baik di bidang pendidikan. politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 14

Konsep pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman hak bagi setiap kelompok. Dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian. Sedangkan secara luas, pendidikan multikultural mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial dan agama.

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Multikultural

Tujuan pendidikan multikultural ada dua, yakni tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya tercapai dengan baik. Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan peserta didik. Harapannya adalah apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya.¹⁵

Sedangkan tujuan akhir pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta

 $^{^{14}\}mathrm{Pertimbangan\text{-}pertimbangan}$ itulah yang perlu dikaji dan direnungkan ulang bagi subjek pendidikan di Indonesia. salah satunya dengan mengembangkan model pendidikan multikultural. Yaitu pendidikan yang mampu mengakomodir sekian ribu perbedaan dalam sebuah wadah yang harmonis, toleran, dan saling menghargai. Inilah yang diharapkan menjadi salah satu pilar kedamaian, kesejahteraan, kebahagian, dan keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia. Lihat H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme tantangan-tantangan global masa depan dalam transformsi pendidikan nasional (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 66-67.

Zakivuddin Baidhawy, op. cit., h. 109.

didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis dan humanis. Karena tiga hal tersebut adalah ruh pendidikan multikultural.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural bertujuan agar peserta didik dapat menghormati keanekaragaman budaya yang ada dan mendorong mereka secara nyata untuk dapat mengenali dan melenyapkan kecurigaan serta diskriminasi yang telah ada. Pada intinya pendidikan multikultural mempunyai dua fokus persoalan, yaitu:

- a. Proses pendidikan yang menghormati, mengakui dan merayakan perbedaan di semua bidang kehidupan manusia. Pendidikan multikultural merangsang anak terhadap kenyataan yang berkembang di masyarakat, yang berupa pandangan hidup, kebiasaan, kebudayaan, yang semuanya telah memperkaya kehidupan manusia.
- b. Proses pendidikan yang menerapkan persamaan keseimbangan dan HAM, menentang ketidakadilan, diskriminasi, dan menyuarakan nilai-nilai yang membangun keseimbangan.¹⁶

Hal senada, Setyo Raharjo mengatakan tujuan pendidikan multikultural adalah: "Membantu anak didik dalam mengembangkan pemahaman dan sikap secara memandai terhadap masyarakat yang beraneka ragam budaya. Anak didik memiliki budaya sendiri yang hakiki, namun tetap memberikan andil terhadap kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan pendidikan yang wajar, tanpa memandang perbedaan, membantu peserta didik untuk berpartisipasi dalam suasana kultur yang berbeda. Membantu anak didik dalam memberdayakan potensi yang optimal". ¹⁷

Menurut pandangan penulis, dalam konteks pembelajaran, pendidikan multikultural bertujuan untuk transformasi pembelajaran kooperatif di mana dalam proses pembelajaran setiap individu mempunyai kesempatan yang sama. Sedangkan, transformasi pembelajaran kooperatif itu sendiri mencakup pendidikan belajar mengajar, konseptualisasi dan organisasi belajar. Belajar kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu strategi pembelajaran yang

¹⁶Lihat Dody S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme:* Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidian Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI., 2010), h. 120-122.

¹⁷Setyo Raharjo, "Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural di Sekolah" Jurnal Ilmiah Guru "COPE" No. 02/Tahun VI/Desember 2002. h. 27.

menggunakan kelompok kecil, di mana pembelajar bekerja bersama, belajar satu sama lain, berdiskusi dan saling membagi pengetahuan, saling berkomunikasi, saling membantu untuk memahami materi pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran kooperatif setiap anggota kelompok bertanggungjawab terhadap keberhasilan setiap anggota kelompoknya.

Berdasar tujuan pendidikan multikultural tersebut, pendidikan multikultural berupaya mengajak warga pendidikan untuk menerima perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai hal-hal yang alamiah (natural sunatullah). Selain itu, pendidikan multikultural menanamkan kesadaran kepada peserta didik akan kesetaraan (equality), keadilan (justice), kemajemukan (plurality), kebangsaan, ras, suku, bahasa, tradisi, penghormatan agama, menghendaki terbangunnya tatanan kehidupan yang seimbang, harmonis, fungsional dan sistematik dan tidak menghendaki terjadinya proses diskriminasi, kemanusiaan (humanity), dan nilai-nilai demokrasi (democration values) yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial. 18

Adapun fungsi pendidikan multikultural, Zakiyuddin Baidhawy mengatakan bahwa akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yakni kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan setiap kebudayaan lain dengan melihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Multikultural mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM., hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu prodiktivitas.

Muktikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dan kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat mempunyai kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

¹⁸Suprapto, *Penanaman Dan Sikap Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Multikultural* Jurnal penelitain pendidikan agama dan keagamaan. Vol VII, No 1, Januari-Maret 2009.

¹⁹Lihat Zakiyuddin Baidhawy, op. cit., h. 4.

Pendidikan multikultural di sini juga dimaksudkan bahwa manusia dipandang sebagai makhluk makro dan sekaligus makhluk mikro yang tidak akan terlepas dari akar budaya bangsa dan kelompok etnisnya. Akar makro yang kuat akan menebabkan manusia tidak pernah tercerabut dari akar kemanusiaannya. Sedangkan akar mikro yang kuat akan menyebabkan manusia mempunyai tempat berpijak yang kuat, dengan demikian tidak mudah diombang-ambingkan oleh perbuatan yang amat cepat, yang menandai kehidupan modern dan pergaulan dunia global.²⁰

Proses untuk mewujudkan multikulturalisme dalam dunia pendidikan, maka perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional, yang pada akhirnya dapat menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural, serta upaya-upaya lain yang dapat dilakukan guna mewujudkannya. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat.

C. Paradigma Pendidikan Multikultural

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu horizontal dan vertikal. Perspektif horizontal, menjelaskan bahwa kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan dan budayanya. Sementara, dalam perspektif vertikal, dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan dan tingkat sosial budaya.²¹

Kemajemukan adalah ciri khas bangsa Indonesia. Seperti diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia, yang mencapai 17.667 pulau besar dan pulau kecil. Jumlah pulau sebanyak itu maka wajarlah jika kemajemukan masyarakat di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan.²²

²⁰Ali Maksum & Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004). h. 190-192.

²¹Usman Pelly dan Asih Menanti, *Teori-Teori Sosial Budaya* (Jakarta: Dirjen Depdikbud, 1994), h. 68.

²²Perlu disadari bahwa perbedaan dengan kemajemukan tersebut merupakan karunia dan anugerah Allah swt. Karena itulah Usman Pelly menyatakan bahwa, meskipun setiap warga negara Indonesia (WNI) berbicara dalam satu bahasa nasional yakni bahasa indonesia,

Kemajemukan suatu masyarakat dapat memberikan *side effect* (dampak) secara positif. Namun, pada sisi lain, ia juga menimbulkan dampak negatif, karena faktor kemajemukan itulah terkadang sering menimbulkan konflik antarkelompok masyarakat. Pada akhirnya, konflik-konflik antarkelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial (*social disharmony*).

Pakar pendidikan, Syafri Sairin memetakan akar-akar konflik dalam masyarakat majemuk, adalah sebagai berikut:

- 1. Perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi (acces to economic resoutces and to means of production);
- 2. Perluasan batas-batas sosial budaya (sosial and cultural borderline expansion);
- 3. Benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama (comflict of political, ideology, and religious interest).²³

Menghadapi pluralisme budaya tersebut, diperlukan suatu paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Pendidikan berparadigma multikulturalisme tersebut penting, sebab akan mengarahkan peserta didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama.

Paradigma ini dimaksudkan bahwa, hendaknya ada apresiatif terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa Indonesia. Berdasarkan pandangan tersebut, diharapkan sikap ekslusif yang selama ini bersemayam dalam otak dan sikap membenarkan pandangan sendiri (*truth claim*) dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalisir.

Paradigma pendidikan multikultural dalam konteks ini memberi pelajaran kepada kita untuk memiliki apresiasi respek terhadap budaya

namun kenyataannya terdapat 350 kelompok etnis, adat istiadat, dan cara-cara sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu. Lihat Usman Pelly, *Kualitas bermasyarakat: Sebuah Studi Peranan Etnis dan Pendidikan dalam Keserasian Sosial* (Medan: Proyek Kerja Sama Kantor Meneg KLH-IKIP Medan, 1988), h. 13. Lihat juga dalam Ali Maksum & Luluk Yunan Ruhendi, *op. cit.*, h. 190-192.

²³Syafri Sairin, *Telaah Pengelolaan Keserasian Sosial dari Literatur Luar Negeri dan Hasil Penelitian Indonesia* (Jakarta: Kerja Sama Meneg, KLH dan UGM, 1992), h. 66.

dan agama-agama orang lain. Atas dasar ini maka penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya yang dibalut semangat demokratisasi, kerukunan, dan perdamain. Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang RI tersebut, konsep pendidikan di Indonesia telah mengakomodir pendidikan multikultural sebagai salah satu konsep dalam meminimalisir terjadinya diskriminatif, dan ketidakadilan terutama dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta upaya dalam menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap orang lain.

Banyak bukti di negeri ini, tentang kerusuhan dan konflik yang berlatarbelakang SARA (suku, adat, ras, dan agama), sekaligus sangat memilukan bahkan "sangat memalukan" di negeri yang multikultur ini. Sebut saja misalnya pengeboman di Bali, konflik berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Ambon dan Palu, konflik etnis di Sambas dan sampit, pembakaran masjid milik jamaah Ahmadiyah di berbagai daerah di Indonesia, penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, kerusuhan dan perusakan sejumlah gereja di Temangggung, Jawa Tengah, penyerangan terhadap pondok pesantren yang diduga beraliran Syiah di Pasuruan dan Sampang Jawa Timur, teror "bom buku" ke sejumlah tokoh, "bom Jum'at" di Mapolres Cirebon, bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Solo, serta penembakan polisi di Solo dan Poso.

Sederet aksi-aksi kekerasan tersebut di atas, membalikkan argumen toleransi masyarakat Indonesia. Bangsa yang dulu dikenal publik dunia dengan keramahan dan tingkat toleransi yang tinggi, tiba-tiba berubah seperti bangsa bar-bar yang tak beradab. Ironisnya, para pelaku

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional)* (UU RI No. 20 Th. 2003) Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 7.

kekerasan tersebut mengatasnamakan Tuhan untuk membenarkan sikap keji mereka.

Fakta-fakta tersebut juga, sebetulnya telah menunjukkan kegagalan dunia pendidikan dalam menciptakan kesadaran pluralisme dan multikulturalisme. Simbol-simbol budaya, agama, ideologi, bendera, baju dan sebagainya, itu semua sebenarnya boleh berbeda. Tetapi, pada hakikatnya kita semua satu, yaitu satu bangsa dan satu negara Indonesia.

Perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural di Indonesia semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter militeristik orde baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa Indonesia namun juga memberikan suatu peluang terhadap meningkatnya kecenderungan primordialisme. Sehingga paradigma pendidikan multikultural hadir untuk menangkal semangat primordialisme.²⁵

Paradigma multikultural yang marak didengungkan sebagai langkah alternatif dalam rangka mengelola masyarakat multikultur seperti di Indonesia tampaknya hanya menjadi wacana belaka. Gagasan ini belum mampu dilaksanakan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah dalam tindakan praksis. Apa yang mengemuka sepanjang tahun 2000-an hingga sekarang sebagaimana yang dikemukakan di atas merupakan indikasi nyata hal ikhawal tersebut.

Faktor lain yang turut menyebabkan mandulnya pendidikan multikultural pada tingkat praksis bisa jadi disebabkan masih dominannya wacana "toleransi" dalam menyikapi realitas multikultural tersebut. Toleransi hanya mungkin terjadi apabila orang rela merelativisasi klaimklaimnya. Namun, toleransi seringkali terjebak pada ego-sentrisme. Ego-sentrisme di sini adalah sikap seseorang mentoleransi yang lain demi diri sendiri. Artinya, setiap perbedaan mengakui perbedaan lain demi menguatkan dan mengawetkan perbedaannya sendiri, yang terjadi kemudian adalah ko-eksistensi bukannya pro-eksistensi yang menuntut kreativitas dari tiap individu yang berbeda untuk merenda dan merajut

²⁵Lihat M Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 56. Lihat pula Zainal Arifin Thoha, *Kenylenehan Gusdur* (Jakarta: Gama Media, 2005), h. 134.

tali-temali kebersamaan. Tak aneh kalau kemudian yang muncul bukannya situasi rukun tetapi situasi acuh tak acuh (*indifference*).²⁶

Pelaksanaan pendidikan multikultural ini mesti dikembangkan prinsip solidaritas. Yakni, kesiapan untuk berjuang dan bergabung dalam perlawanan demi pengakuan perbedaan yang lain dan bukan demi dirinya sendiri. Solidaritas menuntut agar seluruh masyarakat melupakan upaya-upaya penguatan identitas, melainkan menuntut agar berjuang bersama demi kebersamaan yang lain. Artinya, kehidupan multikultural yang dilandasi kesadaran akan eksistensi diri tanpa merendahkan yang lain diharapkan segera terwujud.

Membangun masyarakat yang dapat menghasilkan orang (warga negara) menyadari, mengakui, menghargai perbedaan bukan merupakan hal yang mudah. Perlu dirancang secara sistematik. Menerapakan pendidikan multikultural di sekolah diperlukan upaya transformasi pada tiga tahap yaitu:

1. Transformasi Level Diri (transformation of self)

Transformasi pada level diri dapat digambarkan dengan sikap positif terhadap perbedaan dan keberagaman yang belum terjadi, transformasi tersebut merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pendidikan multikultural. Misalnya, dari tranformasi level diri seperti dapat menghargai perbedaan beragama pada setiap indvidu atau setiap peserta didik di suatu sekolah.

- 2. Transformasi Level Sekolah (*transformation of school and schooling*)

 Transformasi pada level sekolah digambarkan melalui lima dimensi pendidikan multikultural yaitu:
 - a. Integrasi materi (content integration)

Integrasi materi merupakan upaya guru memberikan atau menggunakan contoh dan materi dari bebagai budaya dan kelompok untuk mengajarkan konsep kunci, prinsip, teori, dan lain-lain ketika mengajarkan satu topik atau mata pelajaran tertentu dengan menyisipkan akan adanya kesadaran perbedaan budaya. Misalnya, ketika mengajarkan topik tumbuhan berbiji belah, guru menyinggung bahwa kopi merupakan salah satu contoh dikotil, kemudian dikaitkan bagaimana masyarakat Lampung, Aceh, dan

²⁶Choirul Mahfud, op.cit., h. 190.

Jawa memanfaatkan kopi sebagai minuman tradisi masing-masing daerah tersebut.

b. Proses pembentukan pengetahuan (*knowledge construction procwss*)

Proses pembentukan pengetahuan upaya membantu siswa untuk memahami, mencari tahu, dan menentukan bagaimana suatu pengetahuan atau teori pada dasarnya secara nyata tercipta karena adanya pengaruh budaya, kalangan, dan kelompok tertentu dengan status sosial yang terjadi pada saat itu. Misalnya, Galileo menghasilkan teori *helioentris* yang mengemukakan asumsi *geosentris* yang terjadi pada masa dimana pengaruh agama saat itu sangat dominan. Galileo dihukum mati karena teorinya tetapi belakangan ini teori tersebut dipakai oleh masyarakat dunia.

c. Reduksi prasangka (prejudice reduction)

Reduksi prasangka merupakan upaya guru membantu siswa mengembangkan sifat positif terhadap perbedaan baik dari sisi suku, budaya, ras, gender, status sosial, dan lain-lain. Misalnya, tidak benar kalau guru mendorong sikap atau prasangka yang menganggap bahwa orang papua yang berkulit hitam adalah terbelakang, bodoh dan lain-lain dalam proses interaksi di sekolah inilah yang harus dihindari. Guru seharusnya berkewajiban meluruskan asumsi dan prasangka tersebut.

d. Pendidikan atau perlakuan pedagogik tanpa pandang bulu (*equity pendagogy*)

Pendidikan atau perlakuan pedagogik tanpa pandang bulu adalah upaya guru memperlakukan secara sama dalam proses pembelajaran di kelas. Kenyataan ini akan terlihat dari metode yang digunakan, cara bertanya, penunjukan siswa, dan pengelompokan. Misalnya, guru senantiasa menunjuk seorang siswa sebagai ketua kelompok, karena siswa tersebut anak dari kalangan status sosial tertentu.

e. Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering* school culture and social structure)

Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial merupakan proses menstrukturisasi dan reorganisasi sekolah sehingga siswa dari beragam ras, suku, dan kelas sosial akan mengalami atau merasakan pemberdayaan maupun persamaan budaya. Semangat *multikulturalisme* akan tercermin dalam segala aktivitas sekolah, sehingga menuntut adanya perubahan baik dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan sekolah, struktur organisasi, iklim sekolah, dan lain-lain.

3. Transformasi Level Masyarakat (transformation of society)

Transformasi level masyarakat merupakan upaya paling berat karena sangat komplek dan melibatkan berbagai unsur terkait, hal ini akan terjadi dengan sendirinya jika transformasi level diri dan sekolah berjalan dengan baik.

D. Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islam

Pendidikan multikultural sejatinya inheren dalam Islam. Hal ini dapat ditilik dari doktrin dan sejarah Islam. Al-Qur'an secara sangat eksplisit menyebutkan adanya multikulturalitas. Beberapa di antaranya adalah QS al-Mā'idah / 5:48.

Terjemahnya:

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.²⁷

Selain itu, multikulturalisme juga tampak jelas di dalam firman Allah swt. QS al-Baqarah / 2:256.

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa

²⁷Kementerian Agama RI, op. cit., h. 116.

yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁸

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural tampak nyata pula dalam ajaran Islam. Misalnya dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad saw. pernah mempraktikannya ketika beliau memimpin masyarakat Madinah. Nabi Muhammad saw. telah berhasil mengembangkan prinsip toleransi dan desentralisasi menyangkut keberadaan agama lain selain Islam.²⁹

Prilaku toleransi, Nabi Muhammad saw. menginginkan supaya umat Islam memandang agama lain bukan sebagai musuh, namun sebagai teman dalam menciptakan masyarakat damai. Sementara dengan desentralisasi, Nabi Muhammad saw. memberikan kebebasan kepada umat beragama lain untuk menjalankan ajaran agamanya, kendatipun mereka dalam kekuasaan pemerintahan Islam.

Wujud kongkrit desentralisasi antara lain menyangkut kebijakan bea cukai di wilayah Islam. Pedagang Byzantium yang akan berniaga ke Madinah ditarik bea cukai sebesar cukai pemerintahan Byzantium kepada pedagang Madinah. Demikian juga di wilayah Persia, pedagang muslim tidak ditarik cukai, dan sebaliknya pedagang Persia yang hendak berniaga ke Madinah juga bebas bea cukai.

Contoh lain pasca Nabi Muhammad saw. adalah ketika Abu Ubayd Allah al Mahdi (909-934), seorang khalifah pertama dinasti Fatimiyah di Maghrib, meminta nasehat kepada seorang tokoh Kristen untuk mencarikan lokasi yang tepat untuk dijadikan ibukota negara. Sejarah juga mencatat, kedatangan Islam di Spanyol telah mengakhiri politik monoreligi secara paksa oleh penguasa sebelumnya. Pemerintahan Islam yang berkuasa kurang lebih lima ratus tahun telah menciptakan masyarakat Spanyol yang multikulturalistik. Pemeluk tiga agama: Islam, Kristen, dan Yahudi dapat hidup saling berdampingan dan rukun.³⁰ Mengenai hubungan dengan umat Kristen dan Yahudi, Islam memandang keduanya sebagai "saudara sekandung", sama-sama satu nasab. Secara geneologis, ketiga agama ini berasal dari bapak yang sama, yaitu Nabi Ibrahim, "Bapak Orang Beriman". 31

²⁸*I b i d.*, h. 42.

²⁹Ustadi Hamzah, "Yang Satu dan Yang banyak: Islam dan Pluralitas Agama di Indonesia", "Religiosa" Edisi I/II/Tahun 2006, h. 46-47.

³⁰Lihat Heru Nugroho, "Islam dan Pluralisme", dalam M. Quraish Shihab, dkk., Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 65.

³¹Ahmad Asroni, op. cit., h. 38.

Berdasarkan uraian yang di atas, maka pendidikan multikultural dalam perspektif Islam, menemukan pijakannya dalam piagam madinah.³² Piagam ini menjadi rujukan suku dan agama pada waktu itu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Piagam ini juga menjadi rujukan orang-orang yang ingin menjelaskan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Islam. Pijakan multikultural juga bisa dilacak pada akhlak dan kepribadian Rasulullah saw.

Kenyataan bahwa piagam Madinah dan pribadi Rasulullah menjadi pijakan multikultural, secara tidak langsung menjelaskan al-Quran sebagai muara pijakan tersebut. Hal ini karena dua alasan. *Pertama*, piagam Madinah diajukan oleh Rasullah sebagai acuan hidup bermasyarakat karena dukungan ayat-ayat Madaniyah. *Kedua*, ada keterangan yang menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah al-Qur'an. Artinya, kedua alasan ini menegaskan bahwa pijakan pendidikan multikultural dalam Islam adalah al-Qur'an.

Jadi, orientasi dari pendidikan multikultural dalam Islam ialah tertanamnya sikap simpati, respek, apresiasi (menghargai), dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda untuk meningkatkan kadar taqwa di sisi Allah swt. Karena Allah tidak melihat darimana ia berasal, seberapa tampan atau cantik, seberapa kaya, seberapa tinggi pangkat/jabatan, seberapa kuat badannya, tapi yang dilihat adalah seberapa besar tingkat ketaqwaannya.

Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam Islam yaitu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya yang disesuaikan dengan nafas Islam sebagai sarana dalam mendekatkan diri pada Allah menuju makhluk yang mulia dengan taqwa.

137

_

³²Piagam Madinah mencakup 47 pasal, antara lain berisi hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, sampai toleransi beragama. Piagam Madinah secara resmi menandakan berdirinya suatu negara, yang isinya dapat disimpulkan menjadi empat hal, yaitu: *Pertama*, mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai suku menjadi suatu ikatan. *Kedua*, menhidupkan semangat gotong royong, hidup berdampingan, saling menjamin keamanan di antara sesama warga negara. *Ketiga*, menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata. Dan, *keempat*, menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka. Konsep piagam Madinah tersebut merupakan contoh bahwa yuridis formal, Nabi Muhammad saw. mengakui dan melindungi terhadap pemeluk agama lain. Lihat Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme menuju Kebangsaan* (Cet. V; Yogyakarta: PT Kanisius, 2013), h. 61-62.

³³Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 13-14.

E. Kesimpulan

Pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian didalam dan diluar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Gagasan pendidikan multikultural di Indonesia adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Pendidikan multikultural dipersepsikannya sebagai jembatan untuk mencapai kehidupan bersama dari umat manusia dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Pendidikan multikultural diharapkan akan dicapai suatu kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah diamantkan dalam Undang-Undang Dasar.

Paradigma multikulturalisme global kiranya menjadi jawaban alternative untuk mengatasi keretakan hubungan internasional. Di tahuntahun mendatang, benturan antar nasionalisme dapat dikurangi dengan sebuah perubahan sikap dan kebijakan berbagai pemerintahan dan masyarakat sipil, dari sikap curiga dan memusuhi ke sikap saling menghargai. Kemudian, bekerja dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama, seperti kekerasan, kemiskinan, dan kebodohan.

Pendidikan multikultural urgen untuk diperkenalkan dan diajarkan dalam pendidikan Islam. Pendidikan multikultural sendiri sejatinya kompatibel dengan Islam. Tidak sedikit doktrin dan sejarah Islam yang sarat dengan pendidikan multikultural. Pendidikan Islam memiliki peran yang strategis dalam mendiseminasikan pendidikan multikultural. Hal ini lantaran pendidikan Islam tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat muslim yang notabene merupakan penghuni terbesar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asroni, Ahmad. "Membendung Radikalisme Islam: Upaya Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama", dalam Erlangga Husada, dkk. *Kajian Islam Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

Asy'arie, Musya. "Pendidikan Mulikultural dan Konflik Bangsa", http://www.64.2 03.71. 11/kompas/cetak/0409/03/opini/1246546.htm. (Diakses pada 10 Mei 2014).

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Azra, Azyumardi. "Merayakan Kemajemukan, Merawat Indonesia", *Makalah* disampaikan pada Orasi Budaya, Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies (IMPULSE), di Auditorium Kanisius, Yogyakarta, pada 30 Agustus 2007.
- Baidhawy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: PT Erlangga, 2005.
- Freire, Paulo. Pendidikan Pembebasan. Jakarta: LP3S, 2000.
- Hamzah, Ustadi. "Yang Satu dan Yang banyak: Islam dan Pluralitas Agama di Indonesia", "*Religiosa*" Edisi I/II/Tahun 2006.
- Hasyim, H.A Dardi &Yudi Hartono. *Pendidikan Multikultural di Sekolah.* Surakarta: UPT penerbitan dan percetakan UNS, 1994.
- Imron, Mashadi. *Pendidikan Agama Islam Dalam Persepektif Multikulturalisme*. Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. III; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Maksum, Ali & Luluk Yunan Ruhendi. *Paradigma Pendidikan Universal*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
- Nieto, Sonia. *Language, Culture, and Teaching*. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum, 2002.
- Nugroho, Heru. "Islam dan Pluralisme", dalam M. Quraish Shihab, dkk. *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik.* Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Parekh, Bikkhu. Rethingking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- Pelly, Usman & Asih Menanti. *Teori-Teori Sosial Budaya*. Jakarta: Dirjen Depdikbud, 1994.
- Pelly, Usman. Kualitas bermasyarakat: Sebuah Studi Peranan Etnis dan Pendidikan dalam Keserasian Sosial. Medan: Proyek Kerja Sama Kantor Meneg KLH-IKIP Medan, 1988.
- Raharjo, Setyo. "Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural di Sekolah" Jurnal Ilmiah Guru "COPE" No. 02/Tahun VI/Desember 2002.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 20 Th. 2003).* Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sairin, Syafri. Telaah Pengelolaan Keserasian Sosial dari Literatur Luar Negeri dan Hasil Penelitian Indonesia. Jakarta: Kerja Sama Meneg. KLH dan UGM, 1992.
- Suprapto. *Penanaman Dan Sikap Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Multikultural*. Jurnal penelitain pendidikan agama dan keagamaan. Vol VII, No 1, Januari-Maret 2009.
- Syam, Nur. Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme menuju Kebangsaan. Cet. V; Yogyakarta: PT Kanisius, 2013.
- Tilaar, H.A.R. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2002.
- -----. Kekusaan Dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural. Jakarta: Indonesia Teras, 2003.
- -----. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- -----. Multikulturalisme tantangan-tantangan global masa depan dalam transformsi pendidikan nasional. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Truna, Dody S. Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidian Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI., 2010.
- Yaqin, M. Ainul. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan.* Yogyakarta: Pilar Media, 2005.